

## IMPLEMENTASI SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN DI SMPN 22 PADANG

Azan Muhammad Akbar<sup>1</sup>, Irfan Prima Bakti<sup>2</sup>, Syahril<sup>3</sup>, Irsyad<sup>4</sup>, Novriyanti Achyar<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup> Universitas Negeri Padang, Indonesia

Email: [azanmuhammadakbar18@gmail.com](mailto:azanmuhammadakbar18@gmail.com)



DOI: <https://doi.org/10.34125/jkps.v11i3.2328>

### Sections Info

#### Article history:

Submitted: 23 March 2026

Final Revised: 11 April 2026

Accepted: 16 May 2026

Published: 18 June 2026

#### Keywords:

Quality Assurance System,  
Educational Quality Policy,  
National Education Standards,  
Educational Quality Assurance  
System



### ABSTRAK

*This study aims to understand the education policies and the steps for ensuring the quality of education at SMPN 22 Padang. This research uses a qualitative approach. The type of research is a case study (single case study). The research subjects consisted of 15 informants selected purposively by considering their direct involvement in the implementation of education quality assurance at the school. Data collection techniques were carried out through in-depth interviews, observation, and documentation study. Data analysis was conducted interactively, involving stages of data reduction, data presentation, and drawing conclusions and verification. The research was conducted at SMPN 22 Padang, located at Jl. Tut Wuri Siteba, Nanggalo District, Padang City, West Sumatra. The conclusions of the study are as follows: 1) The education quality policy at SMPN 22 Padang refers to the eight National Education Standards, focusing on three National Education Standards, namely the Process Standard, Graduate Competency Standards and Facilities and Infrastructure Standards. 2) The steps in educational quality assurance consist of five stages: Quality Mapping, Preparation of Fulfillment Plans, Quality Implementation, Quality Evaluation, and Standard Setting.*

### ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan pendidikan serta langkah-langkah penjaminan mutu pendidikan di SMPN 22 Padang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian ini adalah studi kasus (single case study). Subjek penelitian berjumlah 15 informan yang dipilih secara purposive dengan mempertimbangkan keterlibatan langsung dalam implementasi penjaminan mutu pendidikan di sekolah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (in-depth interview), observasi, dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan secara interaktif meliputi tahap reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penelitian dilakukan di SMPN 22 Padang beralamat di Jl. Tut Wuri Siteba, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Sumatera Barat. Kesimpulan penelitian adalah sebagai berikut: 1) Kebijakan mutu pendidikan di SMPN 22 Padang mengacu pada delapan Standar Nasional Pendidikan yang terfokus pada tiga Standar Nasional Pendidikan yaitu Standar Proses, Standar Kompetensi Lulusan, dan Standar Sarana dan Prasarana, 2) Langkah langkah penjaminan mutu pendidikan terdiri dari lima langkah. yaitu Pemetaan Mutu, Penyusunan Rencana Pemenuhan, Pelaksanaan Mutu, Evaluasi mutu dan Penetapan standar.*

**Kata kunci:** *Sistem Penjaminan Mutu, Kebijakan Mutu Pendidikan, Standar Nasional Pendidikan, Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan*

## PENDAHULUAN

Pendidikan pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan masyarakat serta dinamisator masyarakat itu sendiri (Tilaar, 2008). Anwar (2013) mengatakan kepedulian akan mutu pendidikan pun didorong oleh persoalan dasar, bagaimana mengintegrasikan semua fungsi dan proses dalam suatu organisasi agar tercapai peningkatan mutu secara berkelanjutan, hal ini telah di maktubkan dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, yaitu pendidikan dilaksanakan melalui satu sistem pendidikan nasional untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia. Implikasi dari berlakunya undang-undang ini diantaranya adalah adanya suatu standar mutu pendidikan yang bersifat nasional.

Upaya menentukan standar secara nasional adalah adanya Standar Nasional Pendidikan (PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan) untuk berbagai jenis dan jenjang satuan pendidikan. Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan nasional, pada tanggal 25 September 2009 yang lalu, pemerintah melalui Mendiknas telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan. Dalam peraturan ini disebutkan bahwa "*Penjaminan mutu pendidikan adalah kegiatan sistemik dan terpadu oleh satuan atau program pendidikan, penyelenggara satuan atau program pendidikan, pemerintah daerah, Pemerintah, dan masyarakat untuk menaikkan tingkat kecerdasan kehidupan bangsa melalui pendidikan*". Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan yang selanjutnya disebut SPMP yaitu subsistem dari Sistem Pendidikan Nasional yang fungsi utamanya untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Dalam PP No. 19 tahun 2005 disebutkan bahwa pendidikan di Indonesia menggunakan delapan standar yang mejadi acuan dalam membangun dan meningkatkan kualitas pendidikan. Standar Nasional Pendidikan merupakan kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, ada delapan standar yang menjadi kriteria minimal tersebut yaitu; 1) standar isi, 2) standar proses, 3) standar kompetensi lulusan, 4) standar pendidik dan tenaga kependidikan, 5) standar sarana dan prasarana, 6) standar pengelolaan, 7) standar pembiayaan, 8) standar penilaian pendidikan. Standar Nasional Pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat.

Mutu pendidikan adalah hal yang selalu menjadi tujuan seluruh *stakeholder* pendidikan. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, sampai dengan lembaga pendidikan berupaya agar pendidikan yang diselenggarakan selalu bermutu. Peningkatan mutu pendidikan harus dilakukan secara terus menerus. Untuk efektifitas proses peningkatan mutu pendidikan ini, sekolah menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (*School Based Management*). Asumsi dasar pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yaitu sekolah harus lebih bertanggung awab (*high responsibility*), mempunyai wewenang yang lebih (*more authority*), dan dapat dituntut pertanggung jawaban oleh yang berkepentingan (*public accountability by stakeholders*) dalam mengemban misinya sebagai pelayan pendidikan.

Rusaman (2009), mengatakan kelembagaan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP) diposisikan sebagai bagian dari keseluruhan fungsi manajemen pendidikan. SPMP sebagai salah satu fungsi manajemen pendidikan mengemban tugas dan tanggung jawab dalam mengukur serta menilai pemenuhan standar mutu. Pada dasarnya mutu pendidikan di sekolah berkaitan dengan pencapaian tujuan pendidikan dan kompetensi lulusan yang telah ditetapkan oleh satuan pendidikan di dalam program kegiatan atau kesesuaian tujuan dan kompetensi dengan standar yang telah ditetapkan.

Leba dan Pandmomartono (2014), dalam mutu pendidikan terdapat empat pandangan

yang berkembang untuk memaknainya, yaitu: 1) Mutu pendidikan dipandang berdasarkan kemampuan peserta didik setelah mempelajari suatu materi pelajaran. Hal ini dibuktikan dengan nilai raport atau NEM. 2) Mutu pendidikan dipandang dari produktivitas keluarannya, yakni pekerjaan yang diperoleh, tingkat gaji dan status. 3) Mutu pendidikan dipandang berdasarkan kriteria sosial yang lebih luas, misalnya pandai ngomong atau pidato, terampil memimpin organisasi, pandai berdiplomasi dan sebagainya. 4) Mutu pendidikan ditinjau dari komponen pendidikan yang bermutu.

Setiap satuan pendidikan wajib menjalankan penjaminan mutu pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan merupakan keseluruhan fungsi manajemen pendidikan yang mengemban tugas dan tanggung jawab dalam mengukur dan menilai pemenuhan standar mutu. SMPN 22 Padang merupakan salah satu sekolah yang sudah menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah, sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan yaitu Delapan Standar Nasional Pendidikan. Sistem Penjaminan Mutu Dasar dan Menengah adalah suatu kesatuan unsur yang terdiri atas organisasi, kebijakan, dan proses terpadu yang mengatur segala kegiatan untuk meningkatkan mutu Pendidikan Dasar dan Menengah secara sistematis, terencana dan berkelanjutan. Dalam melaksanakan Sistem ini SMPN 22 Padang juga mempunyai organisasi atau tim yang bertugas dalam menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus (Baxter & Jack, 2008; Yin, 2011; Crowe, 2011). Studi kasus yaitu suatu deskripsi intensif dan analisis fenomena tertentu atau satuan sosial seperti individu, kelompok, institusi atau masyarakat. Studi kasus dapat digunakan secara tepat dalam banyak bidang. Disamping itu merupakan penyelidikan secara rinci satu setting, satu subyek tunggal, satu kumpulan dokumen atau satu kejadian tertentu. Penelitian dilakukan di SMPN 22 Padang sebagai satu kasus tunggal (*single case study*) yang dianggap representatif dalam menggambarkan dinamika sistem penjaminan mutu pendidikan, standar nasional pendidikan dan manajemen berbasis sekolah. Subjek penelitian berjumlah 15 informan yang dipilih secara *purposive* dengan mempertimbangkan keterlibatan langsung dalam implementasi penjaminan mutu pendidikan di sekolah. Informan tersebut terdiri atas kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, pengawas sekolah, serta tim penjaminan mutu internal sekolah. Pemilihan informan juga dikembangkan melalui teknik *snowball sampling* untuk memperoleh data yang lebih kaya dan mendalam sesuai kebutuhan penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*), observasi, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dalam menggali implementasi penjaminan mutu pendidikan di sekolah. Observasi digunakan untuk mengamati secara langsung proses implementasi penjaminan mutu pendidikan. Sementara itu, dokumentasi dilakukan terhadap berbagai dokumen yang berkaitan dengan implementasi penjaminan mutu pendidikan.

Analisis data dilakukan secara interaktif dengan mengacu pada model Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), yang meliputi tahap reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode, *member check*, serta diskusi dengan sejawat (*peer debriefing*). Penelitian dilakukan di SMPN 22 Padang beralamat di Jl. Tut Wuri Siteba, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Sumatera Barat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

#### **Kebijakan Mutu Pendidikan di SMPN 22 Padang**

Kebijakan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara sengaja dan bertujuan untuk menjawab suatu permasalahan yang sedang dihadapi agar mencapai suatu tujuan tertentu. Setiap sekolah dalam menjalankan sistem penjaminan mutu harus mempunyai kebijakan tersendiri tanpa meninggalkan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. SMPN 22 Padang merupakan sekolah yang mengimplementasi Kebijakan Mutu Pendidikan dan sebagai sekolah yang meningkatkan mutu melalui manajemen berbasis sekolah (MBS) secara mandiri merumuskan dan membuat beberapa kebijakan yang dirasa penting guna meningkatkan mutu pendidikan pada sekolahnya. SMPN 22 Padang sebagai sekolah menengah yang mengelola pendidikannya berdasarkan pada kebijakan Standar Nasional Pendidikan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Berdasarkan hasil penelitian, sekolah berfokus kepada tiga Standar Nasional Pendidikan yaitu Standar Proses, Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Sarana Prasarana dengan memiliki beberapa program kebijakan untuk mendapatkan output pendidikan yang bermutu.

#### **Standar Proses**

Proses pendidikan di SMPN 22 Padang telah mengikuti Standar Nasional Pendidikan mengenai Standar Proses Belajar Mengajar, Standar tersebut terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penilaian, penutup serta pengawasan pendidikan yang telah dilaksanakan. Untuk dapat terlaksananya proses belajar mengajar yang efektif dan efisien SMPN 22 Padang sebagai sekolah MBS secara mandiri menetapkan dan mengimplementasi beberapa kebijakan guna meningkatkan mutu pendidikannya. Berdasarkan hasil temuan dapat disimpulkan bahwa SMPN 22 Padang menetapkan beberapa kebijakan agar dapat menerapkan dan memaksimalkan Standar Proses yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 dengan baik.

#### **Standar Kompetensi Lulusan**

Standar kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan siswa. Siswa diharapkan dapat melebihi dari Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang dibuat oleh guru pada setiap mata pelajaran. Selain dalam proses belajar mengajar kompetensi lulusan juga diaplikasikan dalam bentuk pengalaman belajar yang diaplikasikan sehari-hari agar siswa dapat berkembang dengan keterampilan yang ada. Dengan adanya Sistem penjaminan mutu sekolah, sekolah mempunyai program yang berguna yaitu program Adiwiyata yaitu program penghijauan sekolah yang bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan sekolah dan *green house* yaitu rumah yang berisi tanaman- tanaman hijau yang bertujuan untuk menghijaukan kembali sekolah serta melatih siswa akan pentingnya peduli terhadap lingkungan. Dalam mencetak lulusan yang baik sekolah yang *basicnya* SMP juga memperhatikan dalam hal pengetahuan agama, agar mempunyai lulusan yang tidak hanya ahli dalam bidang umum tetapi juga bidang keagamaan terutama pendidikan agama Islam. Berdasarkan hasil penelitian dapat mengambil kesimpulan bahwa SMPN 22 Padang telah mengimplementasi Standar kompetensi lulusan dalam Standar Nasional Pendidikan dengan memiliki beberapa kebijakan seperti pendidikan karakter yang mencakup sikap siswa, pendidikan pengembangan bakat dan pendidikan sekolah adiwiyata yang mencakup pengetahuan siswa, serta pendidikan pengembangan bakat yang mencakup keterampilan yang dimiliki siswa lulusan SMPN 22 Padang. Mencetak lulusan yang tidak hanya ahli dalam umum saja melainkan untuk Pendidikan Agama Islam nya juga baik.

### **Standar Sarana dan Prasarana**

Standar sarana prasarana yang ada di SMPN 22 Padang juga telah sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan yang diatur dalam Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar sarana prasarana yang ditunjukkan dalam kelengkapan fasilitas seperti ruang kelas yang dilengkapi Infokus, perpustakaan yang memiliki buku terbaru serta laboratorium IPA yang lengkap. Oleh karena itu, SMPN 22 Padang memiliki kebijakan yang digunakan untuk memaksimalkan penggunaan sarana prasarana. Berdasarkan beberapa hal di atas kemudian dapat disimpulkan bahwa SMPN 22 Padang memiliki sarana prasarana yang lengkap dan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan dengan memaksimalkannya melalui beberapa kebijakan-kebijakan.

### **Pembahasan**

#### **Langkah-langkah Penjaminan Mutu di SMPN 22 Padang**

Penjaminan bisa dilakukan secara menyeluruh maupun dalam batas berjenjang yang dimaksud dengan menyeluruh adalah seluruh proses yang terkait didalam sekolah, seperti penerimaan siswa baru, pembelajaran hingga proses meluluskan siswa yang dijamin mutunya. Dalam meningkatkan mutu pendidikan terdapat langkah-langkah yang harus di penuhi. Alur kerja Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan di SMPN 22 Padang itu berangkat dari EDS, Rapot sekolah (PMP) yang kemudian mendapatkan nilai (bintang 4, 5 dst) nilai yang kurang itu diobati lewat SPMI. Tahap SPMI melalui pemetaan dari rapot kemudian, penyusunan perencanaan pemenuhan, pelaksanaan, evaluasi dan penetapan mutu yang baru. Langkah dalam penjaminan mutu yang *pertama* adalah pemetaan mutu melalui kegiatan evaluasi diri sekolah (EDS) dengan langkah- langkah: penyusunan instrumen, pengumpulan data, pengolahan dan analisis data dan pembuatan peta mutu. Selain kegiatan itu ada rekomendasi perbaikan dan masalah-masalah yang dihadapi. *Kedua*, penyusunan rencana peningkatan mutu dengan menggunakan peta mutu sebagai masukan utama, disamping itu dokumen kebijakan pemerintah sebagai kurikulum dan standar nasional pendidikan serta dokumen rencana pengembangan sekolah. *Ketiga*, pelaksanaan mutu melalui kegiatan pengelolaan satuan pendidikan dan kegiatan proses pembelajaran. *Keempat*, monitoring dan evaluasi, guna untuk memastikan bahwa pelaksanaan peningkatan mutu berjalan sesuai rencana yang telah disusun. *Kelima*, penetapan standar mutu baru. Dari paparan data di atas dapat kita ketahui bahwa dalam meningkatkan mutu pendidikan sekolah harus mempunyai langkah-langkah untuk meningkatkan suatu pendidikan agar berjalan dengan lancar dan menghasilkan rapor yang baik.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta temuan penelitian yang sudah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 1) Kebijakan mutu pendidikan di SMPN 22 Padang mengacu pada delapan Standar Nasional Pendidikan yang terfokus pada tiga Standar Nasional Pendidikan yaitu Standar Proses, Standar Kompetensi Lulusan, dan Standar Sarana dan Prasarana, 2) Langkah-langkah penjaminan mutu pendidikan terdiri dari lima langkah. yaitu Pemetaan Mutu, Penyusunan Rencana Pemenuhan, Pelaksanaan Mutu, Evaluasi mutu dan Penetapan standar.

### **REFERENSI**

- Anwar, Idhoci. (2013). *Administrasi Pendidikan Dan Manajemen Biaya Pendidikan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Danim, Sudarwan. (2010). *Profesionalisasi Dan Etika Profesi Guru*. Bandung: Alfabeta.

- Fatah, Nanang. (2013). *Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Ghoni, M. Djunadi Dan Fauzan Al Manshur. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Irianto, Yoyon Bahtiar. (2012). *Kebijakan Pembaharuan Pendidikan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Leba, Umbutagela Ibi & Sumardjono Pandmomartono. (2014). *Profesi Pendidikan*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Minarti, Sri. (2016). *Managemen Sekolah: Mengelola Lembaga Pendidikan Secara Mandiri*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Permendiknas No 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
- Rusman. (2009). *Manajemen Kurikulum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sallis, Edward. (2008). *Total Quality Management In Education: Managemen Mutu Pendidikan*. Yogyakarta: IRC Perss.
- Syafarudin. (2002). *Manajemen Mutu Terpadu Dalam Pendidikan*. Jakarta: PT Grasindo.
- Tilaar, H. A. R. (2008). *Manajemen Pendidikan Nasional*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Usman, Husaini. (2008). *Manajemen Teori Praktik & Riset Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Yusuf, Choirun Fuad. (2008). *Budaya Sekolah & Mutu Pendidikan*. Jakarta Selatan PT. Pena Citasari.

Copyright holder:

© Author

First publication right:

Jurnal Kepemimpinan & Pengurusan Sekolah

This article is licensed under:

